

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Basis Ekonomi (*Economic Base*)

Teori *economic base* menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Proses produksi sektor industri di suatu daerah yang menggunakan sumberdaya produksi lokal, termasuk tenaga kerja, bahan baku, dan outputnya diekspor akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita, dan penciptaan peluang kerja (*job creation*) di daerah tersebut.

Ferroux dalam Mudrajad Kuncoro (2002) merupakan orang pertama mengemukakan konsep pusat pertumbuhan ekonomi (*economic growth center*). Ferroux menyatakan pusat pertumbuhan ekonomi itu merupakan suatu tempat dalam suatu ruang atau suatu wilayah, darimana kekuatan-kekuatan sentrifugal memancar dan kemana kekuatan-kekuatan sentripental ditarik. Di dalam suatu proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi di seluruh wilayah secara serentak melainkan akan bekerja kearah pengelompokan aktivitas ekonomi yang akhirnya membentuk pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Setiap pusat pertumbuhan ekonomi akan mempunyai daerah penarikan dan daerah penolakan sampai batas tertentu, sehingga dalam suatu wilayah yang luas akan terbentuk gugusan-gugusan pusat pertumbuhan ekonomi dengan wilayah pengaruhnya (*hinterland*) masing-masing. Konsep pusat pertumbuhan ekonomi ini sebagai suatu gugusan industri-industri, baik yang saling terkait maupun yang berdiri sendiri-sendiri, yang kemudian berkembang menjadi kota dan berlokasi pada suatu tempat tertentu dalam suatu wilayah.

Pendapat Ferroux dijelaskan lebih rinci oleh Myrdal dalam Tulus T.H. Tambunan (2001a), pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi akan berkembang industri-industri yang akan memancarkan berbagai bentuk keuntungan (*spread effect*) ke wilayah sekitarnya berupa permintaan hasil-hasil produksi dari

wilayah sekitarnya sehingga perekonomian wilayah sekitar pusat pertumbuhan ekonomi akan ikut berkembang. Lebih lanjut Myrdal menjelaskan kemungkinan adanya efek negatif (*backwash effect*) dari suatu pusat pertumbuhan ekonomi terhadap wilayah sekitarnya yaitu tertariknya atau mengalirnya tenaga kerja potensial dan modal dari wilayah sekitar ke pusat pertumbuhan sehingga wilayah sekitarnya akan kekurangan tenaga kerja yang inovatif atau produktif dan juga dapat mengalami kekurangan modal untuk melakukan atau mengembangkan usaha.

Hirschman (1958) menjelaskan lebih rinci tentang pendapat Myrdal, yaitu pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang merupakan daerah maju akan memberikan dua jenis efek ekonomi yang langsung terhadap wilayah sekitarnya yakni efek yang menyenangkan dan efek yang tidak menyenangkan. Efek yang dikemukakan pertama adalah efek menyebar ke bawah (*trickling down effect*) yaitu meningkatnya pembelian hasil-hasil produksi dan terserapnya tenaga kerja menganggur dari wilayah sekitar oleh industri-industri yang ada di pusat pertumbuhan ekonomi. Sedangkan efek yang tidak menyenangkan adalah efek polarisasi (*polarization effect*) yakni semakin lemahnya daya saing industri-industri yang ada di wilayah sekitar terhadap industri yang serupa di pusat pertumbuhan ekonomi sebagai akibat adanya penghematan aglomerasi.

Friedman (1964) juga menjelaskan mengenai efek pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi relatif berbeda dengan penjelasan Myrdal yaitu efek yang ditimbulkan oleh suatu pusat pertumbuhan ekonomi terhadap wilayah sekitarnya dibagi menjadi lima kategori yaitu: 1) efek dominasi, yaitu berpindahannya sumberdaya berupa tenaga kerja dan modal dari wilayah *hinterland* ke pusat pertumbuhan ekonomi; 2) efek informasi, yaitu makin besarnya hubungan dan interaksi antara wilayah sekitar dengan pusat pertumbuhan ekonomi; 3) efek psikologis, yaitu kecenderungan masyarakat pada wilayah *hinterland* untuk mengikuti perilaku dan pola hidup masyarakat yang ada di pusat pertumbuhan ekonomi; 4) efek modernisasi, yaitu terjadinya perubahan-perubahan nilai sosial yang cepat di wilayah *hinterland*; dan 5) efek ekonomi, yaitu terciptanya kondisi berupa imbalan atau hasil yang diperoleh

dari setiap kegiatan usaha akan makin besar karena adanya spesialisasi dan peningkatan skala usaha di wilayah *hinterland*.

2.2 Pembangunan Sektor Industri di Pedesaan

Struktur ekonomi yang seimbang antara sektor pertanian dan sektor industri dapat diwujudkan dengan cara melaksanakan pembangunan yang seimbang antara sektor pertanian dan sektor industri, sehingga tidak terjadi hambatan dari sisi penawaran dan permintaan. Sebenarnya strategi pembangunan seimbang itu bertujuan untuk keselarasan dalam perekonomian agar antar sektor mampu saling menunjang dan melengkapi satu sama lain. Hal ini dapat dilihat dari program pembangunan pertanian di subsektor perkebunan. Dalam hal ini pembangunan perkebunan kelapa sawit harus ditunjang oleh industri hulunya, antara lain: penyediaan bibit yang baik, sarana produksi yang memadai, alat-alat pertanian yang mendukung. Begitu juga untuk ke depan pembangunan perkebunan kelapa sawit juga dapat merangsang tumbuhnya industri hilir, seperti: pabrik kelapa sawit (PKS) yang menghasilkan minyak sawit, dan industri hilir lainnya yang berbahan baku dari minyak sawit, seperti: industri minyak goreng, deterjen, kosmetik, dan industri kimia lainnya.

Menurut Mellor (1976), pembangunan di sektor industri dan sektor pertanian saling berkaitan dan saling melengkapi satu sama lain. Sektor pertanian memproduksi berbagai produk konsumsi dan bahan baku sektor industri (agroindustri), sedangkan sektor industri memproduksi berbagai kebutuhan untuk sektor pertanian. Selanjutnya Jhingan (1990) mengemukakan, pertumbuhan berimbang membutuhkan keseimbangan antara berbagai sektor ekonomi. Harus ada keseimbangan yang tepat antara investasi di bidang pertanian dan bidang industri, karena kedua bidang ini bersifat saling melengkapi. Peningkatan output di bidang industri membutuhkan perluasan output di bidang pertanian. Jika pekerjaan di sektor industri meningkat, akan membawa peningkatan permintaan bahan-bahan makanan. Karena itu sektor pertanian harus berkembang bersama-sama dengan sektor industri.

Begitu juga apa yang dikemukakan oleh Hirschman dalam Jhingan (1990), investasi pada sektor industri atau sektor-sektor perekonomian yang

strategis akan menghasilkan kesempatan investasi baru dan membuka jalan bagi pembangunan ekonomi lebih lanjut. Pembangunan harus berlangsung dengan cara ini, dengan pertumbuhan yang menjalar dari sektor utama ekonomi ke sektor pendukungnya, dari satu industri ke industri lainnya.

Menurut Schumpeter dalam Jingan (1994), unsur utama pembangunan terletak pada usaha melakukan kombinasi baru yang di dalamnya terkandung berbagai kemungkinan dalam keadaan mantap. Kombinasi baru ini muncul dalam bentuk inovasi. Inovasi dapat terdiri dari: 1) pengenalan barang baru; 2) pengenalan metode produksi baru; 3) pembukaan pasar baru; 4) penguasaan sumber penawaran baru bahan mentah atau barang semi manufaktur; dan 5) pembentukan organisasi baru pada setiap industri. Pengenalan produk baru dan perbaikan terus menerus pada produksi inilah yang membawa kepada pembangunan. Peranan inovator tidak kepada kapitalis tetapi kepada pengusaha. Pengusaha bukanlah seorang manusia yang mempunyai kemampuan manajemen biasa tetapi seseorang yang memperkenalkan sesuatu yang sama sekali baru. Dia tidak menyediakan dana tetapi mengatur pemakaiannya. Pengusaha didorong oleh: a) keinginan untuk mendirikan kerajaan bisnis swasta; b) keinginan untuk menguasai dan membuktikan superioritasnya, dan c) kesenangan membuat dan mendapatkan sesuatu, atau sekedar menyalurkan kepintaran dan tenaga seseorang.

Inovasi mempunyai tiga pengaruh yaitu: (1) diperkenalkannya teknologi baru; (2) inovasi menimbulkan keuntungan lebih yang merupakan sumber dana penting bagi akumulasi kapital; dan (3) inovasi pada tahap-tahap selanjutnya akan menimbulkan proses imitasi, yaitu adanya pengusaha-pengusaha lain yang meniru teknologi tersebut. Proses imitasi ini mempunyai pengaruh berupa: Pertama, menurunnya keuntungan monopoli yang dinikmati oleh para inovator; dan kedua, penyebaran teknologi baru di dalam masyarakat (teknologi tersebut tidak lagi menjadi monopoli para inovatornya)

2.3 Distorsi Harga dan Pemasaran

Sistem pemasaran pertanian mencakup banyak lembaga, baik yang berorientasi laba maupun nirlaba, baik yang terlibat dan terkait secara langsung

maupun yang tidak terlibat atau terkait langsung dengan operasi sistem pemasaran pertanian. Sistem pemasaran yang kompleks tersebut diharapkan dapat memainkan peranan penting dalam upaya memaksimalkan tingkat konsumsi kepuasan konsumen, pilihan konsumen, dan mutu hidup masyarakat (Downey, W David dan Steven P. Erickson, 1987).

Pemasaran dalam kegiatan pertanian dianggap memainkan peran ganda. Peran pertama merupakan peralihan harga antara produsen dengan konsumen. Peran kedua adalah transmisi fisik dari titik produksi (petani atau produsen) ke tempat pembelian (konsumen). Namun untuk memainkan kedua peran tersebut petani menghadapi berbagai kendala untuk memasarkan produk pertanian, khususnya bagi petani berskala kecil. Masalah utama yang dihadapi pada pemasaran produk pertanian meliputi, antara lain: 1) kesinambungan produksi; 2) kurang memadainya pasar; 3) panjangnya saluran pemasaran; 4) rendahnya kemampuan tawar-menawar; 5) berfluktuasinya harga; 6) kurang tersedianya informasi pasar; 7) kurang jelasnya jaringan pemasaran; 8) rendahnya kualitas produksi; dan 9) rendahnya kualitas sumberdaya manusia

Untuk mengatasi masalah pemasaran produk pertanian yang dialami oleh petani, maka perlu dipikirkan paradigma baru dalam mengatasi masalah tersebut. Salah satu alternatif pemecahannya adalah memberdayakan lembaga ekonomi pedesaan yaitu koperasi. Menurut Bungaran Saragih (2001) mengembangkan usaha agribisnis skala kecil perlu dibentuk koperasi. Tanpa koperasi tidak mungkin agribisnis kecil dapat berkembang. Koperasi inilah yang akan berhubungan dengan pengusaha besar. Melalui koperasi masalah yang dihadapi oleh petani dapat teratasi.

Selain yang diungkapkan di atas, koperasi juga berfungsi sebagai: *Pertama*, mencari alternatif pemecahan masalah pertanian seperti penyediaan kredit, pembentukan modal bersama melalui tabungan, penyediaan sarana produksi, pengendalian hama terpadu, pelaku agroindustri, memasarkan produk pertanian dan sebagainya; *Kedua*, memberikan kemudahan berupa pelatihan dan pembinaan kepada petani dalam usaha-usaha yang dilakukannya; dan *ketiga*, petani perlu diorganisir untuk

memperkuat posisi tawar-menawarnya dalam menghadapi persaingan dan melakukan kemitraan dengan pihak lain (Almasdi Syahza, 2003b).

Pihak pengusaha yang berada pada posisi yang kuat dapat membantu petani pada posisi yang lemah dalam bentuk jaringan kemitraan. Hubungan ini dapat memberikan keuntungan kepada petani, yaitu: *Pertama*, transfer teknologi dan penyediaan masukan sehingga petani mampu bersaing dengan produk lain yang dihasilkan dengan menggunakan masukan dan teknologi yang lebih unggul; *Kedua*, dapat memperoleh informasi dan peluang pasar secara cepat; *Ketiga*, dapat membuka akses terhadap modal dan pasar; dan *keempat*, adanya jaminan dan kepastian pasar bagi produk pertanian (Almasdi Syahza, 2003e).

2.4 Disparitas Pembangunan Wilayah

Dalam proses pembangunan yang terjadi selama ini adalah *polarization effect* yang ditandai dengan mengalirnya modal dan tenaga kerja dari daerah yang belum berkembang ke daerah yang telah berkembang dan *spread effect* serta *striking down effect* (banyaknya bahan baku dari daerah yang belum berkembang yang dapat dipasarkan ke daerah yang telah berkembang karena kebutuhan di daerah tersebut meningkat) yang diharapkan malah tidak terjadi. Akibat yang dirasakan adalah daerah yang sudah berkembang semakin berkembang dan di daerah tersebut akan terjadi penumpukan kegiatan industri, sementara daerah-daerah lain semakin tertinggal dan tidak diminati oleh investor. Adanya hal-hal yang dikemukakan di atas mendorong keharusan adanya *government intervention* (campur tangan pemerintah) untuk mengurangi tingkat *Regional Inequalities* tersebut.

Menurut Tulus T.H. Tambunan (2001), faktor utama penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi antar propinsi di Indonesia adalah, antara lain: 1) konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah; 2) kurangnya investasi di suatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat per kapita di wilayah tersebut menjadi rendah; 3) kurang lancarnya mobilitas faktor produksi seperti tenaga

kerja dan kapital antar propinsi; 4) perbedaan sumberdaya alam antar wilayah, dan pemanfaatan serta pengeloan yang tidak efisien; 5) perbedaan kondisi demografi antar daerah, penyebab utamanya adalah pertumbuhan dan jumlah penduduk, tingkat kepadatan penduduk, pendidikan, kesehatan, disiplin masyarakat, dan etos kerja; dan 6) kurang lancarnya perdagangan antar daerah, penyebabnya adalah terbatasnya sarana transportasi dan komunikasi.

Dari apa yang diungkapkan di atas tentang penyebab ketimpangan antar wilayah dan ketidak merataan pendapatan, maka dalam penelitian ini mencoba mengkaji apakah pembangunan perkebunan di daerah Riau juga penyebab ketimpangan antar daerah atau sebaliknya dapat mengurangi ketimpangan tersebut dan menciptakan pendapatan yang lebih merata antar golongan dalam masyarakat, khususnya pada masyarakat pedesaan.

Seperti yang dikutip oleh Tommy Firman (1977), menurut Williamson, pada umumnya *regional inequalities* cenderung membesar pada saat terjadinya proses perkembangan. Hal ini disebabkan karena faktor-faktor sebagai berikut: 1) migrasi penduduk yang produktif (usia kerja) dan memiliki skill/ terdidik ke daerah-daerah yang telah berkembang, karena di sana mereka dapat memperoleh upah/gaji yang lebih tinggi; 2) investasi cenderung berlaku di daerah yang telah berkembang, karena faktor market dan lain-lain, dimana keuntungan relatif lebih besar, demikian pula resiko kerugian relatif lebih kecil; 3) kebijaksanaan pemerintah cenderung mengakibatkan terkonsentrasinya *social and economic overhead capital* di daerah yang telah berkembang karena kebutuhan yang lebih besar. Hal ini justru mendorong perkembangan industri yang lebih pesat; 4) tidak adanya kaitan (*linkages*) diantara *regional markets*, menyebabkan rintangan untuk pemancaran (*spread effects*) inovasi dan *income multiplier*.

Salah satu sebab meningkatnya kesenjangan dan kemiskinan antar daerah di masyarakat pedesaan adalah karena adanya distorsi pembangunan yang lebih banyak berpihak kepada ekonomi perkotaan yang dikuasai kelompok ekonomi kuat, dimana mereka ini dekat dengan kekuasaan. Dampaknya terhadap kepemilikan faktor produksi seperti tanah, modal tidak merata dan tidak adil. Selain itu rendahnya teknologi produksi, sedikitnya

teknologi pengolahan hasil, akses pemasaran serta rendahnya keterampilan menyebabkan mereka tidak dapat berbuat banyak untuk kegiatan produksi, akibatnya pendapatan mereka menjadi sangat rendah.

2.5 Daya Dukung Wilayah

Daya dukung wilayah adalah kemampuan wilayah dalam menyediakan bahan baku industri yang ada di kawasan wilayah itu sendiri. Konsep daya dukung wilayah paling mudah diterapkan pada sistem agraris. Dalam sistem itu industri yang berbasis agraris kesinambungan kegiatannya tertumpu pada pertanian dalam arti luas. Menurut Sostroamidjojo dan Entang (1975) pengukuran daya dukung wilayah didasarkan pada kemampuan lahan (*land capability*). Pada umumnya kemampuan lahan dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan lahan dalam fungsinya sebagai media tumbuh untuk mencapai tingkat produksi tertentu. Dalam keadaan ini yang ditinjau adalah daya dukung wilayah terhadap pengembangan industri hilir yang berbasis kelapa sawit.

Menurut Suparmoko (1997), lahan merupakan sumberdaya alam yang paling penting untuk kelangsungan kehidupan manusia, karena lahan atau tanah merupakan masukan (input) yang diperlukan untuk setiap bentuk aktifitas manusia, baik untuk kegiatan pertanian, daerah industri, daerah pemukiman, jalan-jalan, daerah rekreasi maupun untuk keperluan tertentu seperti untuk kegiatan alamiah. Sedangkan Todaro (2000) berpendapat bahwa lahan merupakan sumber fisik yang mempengaruhi potensi suatu negara untuk pertumbuhan ekonominya.

Pada dasarnya daya dukung itu tergantung pada kemampuan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan perkebunan guna mendukung berkembangnya industri yang berbasis kelapa sawit. Makin besar persentasi lahan yang dipakai untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit makin besar daya dukung wilayah. Karena semakin luas areal perkebunan akan semakin besar produksinya. Tentu saja akan menghasilkan bahan baku yang diperlukan untuk industri pengolahan kelapa sawit. Persentasi lahan ditentukan oleh kesesuaian tanah untuk perkebunan kelapa sawit.

Pengembangan industri kelapa sawit (pabrik kelapa sawit) di daerah Riau erat kaitannya dengan daya dukung wilayah, terutama dalam penyediaan bahan baku untuk industri itu sendiri, terutama tandan buah segar (TBS). Tanpa tersedianya bahan baku yang cukup proses produksi akan terhalang dan kontinuitas produk selanjutnya akan terganggu. Untuk pengembangan industri hilir kelapa sawit perlu dilakukan suatu analisis tentang daya dukung wilayah guna menunjang pengembangan industri hilir berbasis kelapa sawit di daerah Riau.

2.6 Pembangunan Pertanian Berbasis Agribisnis

Pembangunan pedesaan yang berbasis agribisnis harus dapat mengurangi ketimpangan antara desa dan kota. Salah satu konsep yang pernah dikemukakan oleh *Friedmann, J* dan *Mike Douglass* (1976) adalah pengembangan agropolitan. Dalam konsep tersebut dikemukakan bagaimana cara mempercepat pembangunan di pedesaan dengan potensi yang dimiliki oleh desa. Untuk itu hal yang perlu dilakukan adalah: *Pertama*, merubah daerah pedesaan dengan cara memperkenalkan unsur-unsur gaya hidup kota (*urbanism*) yang telah disesuaikan pada lingkungan pedesaan tertentu. Bentuk ini tidak lagi mendorong perpindahan penduduk desa ke kota. Menanam modal di pedesaan merupakan salah satu cara menekan urbanisasi dan merubah tempat permukiman di desa menjadi suatu bentuk campuran yang dinamakan agropolis atau kota di ladang. *Kedua*, memperluas hubungan sosial di pedesaan sampai keluar batas-batas desanya, sehingga terbentuk suatu ruang sosio-ekonomi dan politik yang lebih luas (*agropolitan district*). *Ketiga*, memperkecil keretakan sosial (*social dislocation*) dalam proses pembangunan, yaitu: memelihara kesatuan keluarga, memperteguh rasa aman, dan memberi kepuasan pribadi dalam membangun masyarakat baru. *Keempat*, menstabilisasikan pendapatan desa dan kota. Memperkecil perbedaannya dengan cara memperbanyak kesempatan kerja yang produktif di pedesaan, khususnya memadukan kegiatan pertanian dengan nonpertanian dalam lingkungan masyarakat yang sama. *Kelima*, menggunakan tenaga kerja yang ada secara lebih efektif dengan mengarahkan pada usaha-usaha

pengembangan sumberdaya di tiap-tiap agropolitan district, termasuk peningkatan hasil pertanian. *Keenam*, merangkai *agropolitan district* menjadi jaringan regional dengan cara membangun dan memperbaiki sarana hubungan antara agropolitan district dengan kota. *Ketujuh*, menyusun suatu pemerintahan dan perencanaan yang sesuai dengan lingkungan, sehingga dapat mengendalikan pemberian prioritas pembangunan serta pelaksanaannya pada penduduk daerahnya. *Kedelapan*, menyediakan sumber-sumber keuangan untuk membangun agropolitan dengan cara: a) menanam kembali bagian terbesar dari tabungan setempat di tiap-tiap distrik; b) mengadakan sistem bekerja sebagai pengganti pajak bagi semua anggota masyarakat yang telah dewasa; c) mengalihkan dana pembangunan dari pusat-pusat kota dan kawasan industri khusus untuk pembangunan agropolitan; dan d) memperbaiki nilai tukar barang-barang yang merugikan antara petani dan penduduk kota agar lebih menguntungkan petani.

Menurut Ginandjar Kartasasmita (1996), pembangunan pedesaan harus dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan sifat dan cirinya. Pembangunan pedesaan harus mengikuti empat upaya besar, satu sama lain saling berkaitan dan merupakan strategi pokok pembangunan pedesaan, yaitu: *Pertama*, memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Dalam upaya ini diperlukan masukan modal dan bimbingan-bimbingan pemanfaatan teknologi dan pemasaran untuk memampukan dan memandirikan masyarakat desa; *Kedua*, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pedesaan agar memiliki dasar yang memadai untuk meningkatkan dan memperkuat produktivitas dan daya saing; *Ketiga*, pembangunan prasarana di pedesaan. Untuk daerah pedesaan prasarana perhubungan merupakan kebutuhan yang mutlak, karena prasarana perhubungan akan memacu ketertinggalan masyarakat pedesaan; dan *keempat*, membangun kelembagaan pedesaan baik yang bersifat formal maupun nonformal. Kelembagaan yang dibutuhkan oleh pedesaan adalah terciptanya pelayanan yang baik terutama untuk memacu perekonomian pedesaan seperti lembaga keuangan.